

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak Cina melakukan reformasi ekonomi domestik pada tahun 1978, Cina mulai mengawali pertumbuhan ekonomi yang pesat melalui perdagangan internasional. Pada waktu yang sama, investasi asing juga mulai turut serta dalam mempengaruhi perindustrian mereka. Alhasil Cina kemudian menjadi pangsa pasar dari rantai nilai industri di negara maju karena keunggulan dari tenaga kerja yang murah dan secara geografis dekat dengan pasar Asia yang secara mayoritas besar. Karena Cina yang bergantung terhadap ekspor untuk penggerak perekonomiannya. Perekonomian seperti ini terlalu bergantung terhadap industri dan dukungan teknologi dari negara-negara maju yang juga dikendalikan langsung oleh *Multinational Corporations* (MNCs) yang membuat Cina mendapat gelar “*the world’s factory*”. Di sisi lain, Cina yang bergantung terhadap dukungan teknologi dari negara maju akhirnya mengalami stagnasi di bidang industri manufaktur dikarenakan minimnya inovasi, yang akhirnya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang juga stagnan. Atas dasar inilah Cina akan terhambat dalam memonopoli pasar teknologi penting seperti perakitan chipset, dan komponen teknologi maju lainnya yang lebih besar. (Agarwala & Chaudhary, 2021, hal. 424).

Gambar 1 Peta Wilayah Cina



Sumber: (Kevin, 2017)

Di sisi lain, secara historis, revolusi industri merupakan periode industrialisasi besar-besaran dan menjadi kekuatan baru bagi negara-negara untuk mendistribusikan perekonomiannya. Selama akhir tahun 1700-an sampai awal 1800-an menjadi titik negara-negara di Eropa berhasil memajukan perekonomian negaranya setelah mesin uap ditemukan, yang menjadi titik awal revolusi industri 1.0 lahir. Dewasa ini, beberapa negara sedang mengimplementasikan revolusi industri 4.0, hal ini ditandai dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada industri. Revolusi industri keempat ini dapat menjadi rencana strategi baru untuk negara-negara dalam memajukan perekonomian dalam menghadapi kondisi perekonomian global (Li, 2018).

Selanjutnya, terpilihnya Xi Jinping sebagai presiden baru Cina setelah Kongres Nasional ke-18, Xi mengumumkan cita-cita besar Tiongkok yang selanjutnya dikenal dengan istilah *Chinese dream*. Cita-cita ini bermaksud untuk 'rakyat makmur' pada tahun 2021, dan menjadi negara kuat bersaing dengan negara maju lainnya pada peringatan 100 tahun Partai Komunis Cina. Maka dari itu untuk mencapai upaya-upaya itu dilaksanakan berbagai program-program besar seperti Belt and Road Initiative tahun 2013, Made in China 2025 tahun 2015, Water Ten Plan tahun 2015, Energy Development Action Plan

tahun 2014, dan Internet Plus tahun 2015 (Agarwala & Chaudhary, 2021, hal. 425).

Dari berbagai rencana strategis tersebut, Made in China 2025 (MIC25) digunakan sebagai fokus dalam tulisan ini. Secara historis, kata 'Made in China' sendiri adalah kode yang berfungsi sebagai label bahwa produksi dilakukan di Cina. Produk-produk tersebut meliputi padat karya seperti elektronik dan barang jadi yang dibuat di China tetapi didesain oleh negara-negara barat. Sayangnya, istilah 'Made in China' dilabel negatif karena dianggap memiliki citra murah dengan kualitas yang kurang baik sebagaimana produk-produk tersebut dinilai kurang dalam segi inovasi dan teknologi yang berkaitan dengan desain dan proses produksi (Wu & Duan, 2018, hal. 591).

Kebijakan industri pada tahun 1978 yang menjadi titik utama Cina dikenal sebagai pabrik dunia, kemudian mengeluarkan beberapa kebijakan industri lainnya yang bertujuan untuk memajukan industri manufaktur mereka. Pertama, Kebijakan tersebut adalah bergabungnya Cina dengan World Trade Organization (WTO) pada tahun 2002 (Jigang, 2020). Kedua, Rencana Jangka Menengah Panjang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk lima belas tahun (2005-2020) pada tahun 2006, yang kemudian digantikan menjadi *Strategic Emerging Industries* (SEI) pada tahun 2010 (Agarwala & Chaudhary, 2021, hal. 444). Di samping itu, bersamaan dengan kebijakan tersebut, melalui Kongres Nasional ke-18 pada tahun 2012, Cina menyinggung untuk memperkuat sektor-sektor industri manufaktur berbasis inovasi dan mengimplementasikan proyek sains dan teknologi secara besar-besaran untuk mengatasi kemacetan teknologi di Cina (Jigang, 2020).

Maka dari itu, Made in China 2025 adalah lanjutan dari rencana Cina sebelumnya untuk mengembangkan industri manufaktur yang maju. Selain itu, label Made in China yang cenderung dipandang negatif juga akan diubah melalui MIC25. Dalam usaha mengubah citra tersebut, pada tahun 2015 Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi (MIIT) Cina berinisiatif untuk mengubah citra lama label 'Made in

China' menjadi 'Chinese Smart Manufacturing' yang kaya akan kemajuan teknologi dan inovasi. Inisiatif ini kemudian dituangkan menjadi rencana strategis Cina yang disebut sebagai Made in China 2025 atau MIC25 dalam laporan kerja tahun 2015 (Wu & Duan, 2018, hal. 591). Makna angka 2025 sendiri adalah target dari Cina yaitu satu dekade ketika Cina pertama membuat rencana strategis ini (Agarwala & Chaudhary, 2021, hal. 426).

MIC25 secara kuat terinspirasi oleh strategi Industri 4.0 milik Jerman. Hal ini sebagaimana dibuktikan dari kunjungan Presiden Xi Jinping, Perdana Menteri Li Keqiang, dan Wakil Perdana Menteri Ma Kai melakukan kunjungan kenegaraan ke Jerman untuk membicarakan Industry 4.0 milik Jerman pada tahun 2014 (Wübbecke, Meissner, Zenglein, Ives, & Conrad, 2016, hal. 17). Kemudian, rencana strategis MIC25 mirip dengan rencana strategis milik Cina lainnya yaitu Internet Plus. Secara garis besar, Internet Plus adalah rencana yang berisikan usaha pemerintah Cina untuk mendigitalisasi ekonomi masyarakat di samping internet tradisional. Walaupun hal ini mengindikasikan MIC25 dan Internet Plus tumpang tindih, pemerintah Cina fokus dalam merealisasikan tujuan akhir dari MIC25 untuk menciptakan *smart manufacturing* (Wübbecke, Meissner, Zenglein, Ives, & Conrad, 2016, hal. 20).

Cina yang memprioritaskan MIC25 terlihat, dimana Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi (MIIT) Cina menyampaikan rencana anggaran untuk dialokasikan secara khusus untuk proyek-proyek besar dalam menunjang MIC25. Hal ini dibuktikan dimana dibentuknya *Advanced Manufacturing Fund* dengan alokasi dana yang mencapai US\$ 2,9 miliar (Wübbecke, Meissner, Zenglein, Ives, & Conrad, 2016, hal. 7). Selain itu, Xi Jinping mendirikan *National IC Industry Investment Fund* untuk mengembangkan semikonduktor dalam MIC25 dengan menginvestasikan dana sebesar US\$ 150 miliar (Rubio, 2017, hal. 36).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Mengapa Cina serius dalam menyukseskan rencana strategis Made in China 2025?

C. Kerangka Pemikiran

1. Kebijakan Industri

Mulai dari tahun 1950-an, perdebatan mengenai kebijakan industri dibahas dan dicoba diaplikasikan terhadap negara-negara berkembang yang mengalami industrialisasi. Negara berkembang tersebut melihat kebijakan industri adalah kunci keberhasilan untuk bisa keluar dari keterpurukan ekonomi dan sosial pasca Perang Dunia Kedua. Sebagai contoh, negara-negara di Asia Timur (Jepang, Korea Selatan, dan Cina) menjadikan kebijakan industri sebagai alat utama mereka untuk mencapai perekonomian global. Dewasa ini, kebijakan industri kembali dibahas setelah terjadinya krisis keuangan global pada tahun 2008 (Andreoni & Chang, 2019, hal. 136).

Pada dasarnya tidak ada definisi pasti mengenai apa itu kebijakan industri. Hal ini dikarenakan banyak pakar seperti pakar ekonom tidak setuju mengenai perspektif jelas tentang ideologi kebijakan industri. Mereka [pakar ekonom] hanya sepakat bahwa kebijakan industri secara umum merupakan bentuk dari intervensi pemerintah (negara) ke dalam industri (UNECA, 2016, hal. 28). Maka dari itu, jika kebijakan industri didefinisikan secara lebih luas, akhirnya membutuhkan kriteria-kriteria tambahan yang dimasukkan ke dalam kebijakan industri, sehingga sebelum membahas perdebatan mengenai kebijakan industri perlu adanya kesepakatan terhadap fakta-fakta dasar. Hal ini yang membuat mereka sepakat bahwa *'all countries have industrial policy'* dan pertanyaan tentang kebijakan industri adalah bukan karena apakah harus dipraktekan tapi *'bagaimana (how)'* (Naughton, 2021).

Bukti dari perdebatan tersebut dapat dilihat bagaimana para ekonom merelevansikan kebijakan industri dengan

'*economic miracles*' yang terjadi di Asia Timur (Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan). Dimana, sebelum terjadinya '*economic miracles*' mereka (terutama orang-orang neoliberalis) mendiskreditkan kebijakan industrialisasi dan percaya bahwa ekonomi tidak akan tumbuh dengan adanya intervensi dari pemerintah atau negara (UNECA, 2016, hal. 28).

Sifat dasar kebijakan industri yang intervensi, pada akhirnya memiliki makna yang macam-macam. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Dani Rodrik (2012, hal. 139-140) dalam tulisannya *Why We Learn Nothing from Regressing Economic Growth on Policies* menyatakan bahwa intervensi di dalam kebijakan industri bisa bermakna ganda. Di satu sisi, intervensi adalah respon dari pemerintah yang bersifat '*developmental* (perkembangan)'. Sehingga, negara disini ingin meningkatkan kesejahteraan, menyempurnakan pasar, dan mengejar ketertinggalan dari negara maju. Di sisi lain, intervensi pemerintah di dalam industri bisa bersifat '*political* (politik)'. Dimana maksudnya, kebijakan industri diatur oleh 'politisi pemburu rente' yang mencari keuntungan melalui kebijakan industri. Pemburu rente sendiri dapat dipahami sebagai suatu entitas baik individu atau perusahaan yang ingin mencapai keuntungan melalui koneksi dengan pemerintah (Pelayananpublik.id, 2021).

Elie Cohen dalam tulisannya berjudul *Theoretical Foundations of Industrial Policy* (2006, hal. 85) berargumen bahwa kebijakan industri adalah 'kebijakan sektoral'. Maksud dari kebijakan sektoral ini adalah kebijakan tersebut ditujukan untuk sektor-sektor tertentu. Dalam hal ini, Cohen menambahkan kebijakan industrialisasi dapat dipahami sebagai usaha pemerintah (negara) terhadap beberapa sektor secara spesifik diantaranya yaitu mengurangi ketergantungan negara, mencapai kemandirian di sektor teknologi, berkurangnya pola hidup masyarakat yang rural, serta untuk mencapai keseimbangan secara politik.

Selanjutnya, dalam memahami kebijakan industrialisasi juga tidak hanya sebatas landasan teoretis. Cohen berargumen bahwa kebijakan industrialisasi bergantung pada negara dan

seberapa berpengaruhnya kapitalisme di negara tersebut. Pada akhirnya, tanggung jawab kebijakan tersebut bergantung kepada negara, bank umum, maupun otoritas lokal. Sebagai contoh, Sekretaris Negara untuk Industri dan Teknologi Tinggi di Amerika Serikat pada faktanya adalah Sekretaris Negara untuk Pertahanan. Kemudian, bantuan untuk industri di Jerman dibebankan kepada *Länder* (negara bagian), dan Bank Umum memiliki tanggung jawab terhadap industri yang mengalami kesulitan (Cohen, 2006, hal. 85-86).

Untuk memahami lebih lanjut kebijakan industri secara teoretis, Barry Naughton (2021) dalam tulisannya *The Rise of China's Industrial Policy, 1978 to 2020* mendefinisikan kebijakan industri adalah setiap jenis intervensi dari pemerintah secara terarah dan selektif yang ditujukan untuk mengubah struktur produksi sektoral menuju sektor-sektor yang diharapkan mampu menawarkan pertumbuhan yang lebih baik dari pada apa yang seharusnya terjadi di dalam ekuilibrium pasar yang sifatnya 'non-intervensionis'.

Secara historis, Cina sendiri mengeluarkan kebijakan industrinya pada tahun 1978 untuk mereformasi ekonomi mereka. Dalam kebijakan industri ini, Cina berusaha terbuka kepada dunia luar untuk mendirikan pabrik dan melakukan transfer teknologi. Selanjutnya, kebijakan industri Cina terus berlanjut seperti Rencana Jangka Menengah Panjang pada tahun 2006, *Strategic Emerging Industries* (SEI) pada tahun 2010, dan *Made in China 2025* pada tahun 2015. Hal ini membuktikan bahwa Cina terus mengintervensi industri manufaktur mereka dengan berbagai kebijakan industri. Selain itu, MIC25 pada pelaksanaannya akan merestrukturisasi industri domestik Cina yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

2. Neorealisme

Neorealisme sendiri merupakan kritik terhadap realisme klasik dimana realis berasumsi bahwa *human nature* (sifat manusia) yang menjadi penyebab terjadinya *struggle for power* (perebutan kekuasaan). Neorealisme justru beranggapan *human*

nature tidak ada kaitannya dengan *struggle for power*, melainkan hal tersebut terjadi karena struktur internasional yang bersifat anarki yang membuat negara menjadi agresif (Dugis, 2016, hal. 82). Maka dari itu, neorealisme juga sering disebut dengan realisme struktural (Dugis, 2016, hal. 84).

Dalam teori neorealisme terdapat tiga asumsi utama yaitu sebagai berikut:

Pertama, sistem internasional adalah ‘anarki’, maksud kata anarki disini adalah tidak adanya otoritas di sistem internasional yang menetapkan aturan perilaku negara dan memiliki kekuasaan untuk menghukum pelanggaran aturan dan norma di sistem internasional. Hal ini menimbulkan perasaan tidak aman karena rasa curiga dan ketakutan bersama yang pada akhirnya menimbulkan ‘*security dilemma*’, dimana negara dapat diserang dan menyerang tanpa di prediksi. Sehingga, kepentingan nasional tiap negara adalah untuk memaksimalkan kekuasaan dalam menjamin kehidupan negara (Spindler, 2013, hal. 128).

Kedua, sebagaimana asumsi dari realisme klasik bahwa negara adalah aktor utama, hal tersebut juga dikemukakan oleh neorealisme yang menganggap negara adalah aktor yang paling penting dan rasional dalam menjalankan politik internasional. Oleh karena itu, asumsi teori neorealisme ini mengatakan bahwa negara mencari kelangsungan hidup sendiri (*survival*) untuk mendominasi dalam sistem internasional. (Dugis, 2016, hal. 82).

Ketiga, seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa sifat negara adalah untuk mencari keselamatan (*survival*), maka distribusi kekuatan militer dan ekonomi adalah faktor sistemik. Maksudnya adalah ekonomi dan militer sebagai sistem utama untuk menjelaskan perilaku aktor (negara) dalam hubungan internasional (Spindler, 2013, hal. 128). Oleh karena itu, neorealisme adalah teori untuk menganalisis persaingan negara atas sumber daya militer dan ekonomi. Misalnya, jika negara A meningkatkan pertahanan alutsista mereka, maka dari itu Negara B juga memungkinkan untuk meningkatkan persenjataannya, atau bahkan membentuk aliansi dengan negara

lain agar dapat menyeimbangkan kekuatan Negara A (Biller, 2017, hal. 3).

Dewasa ini, neorealisme terbagi menjadi dua teori yaitu neorealisme ofensif dan defensif. John Mearsheimer (2001, hal. 362-363) dalam tulisannya *The Tragedy of Great Powers Politics*, yang merupakan tokoh dari neorealisme ofensif mengemukakan sistem internasional memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Sistem internasional bersifat anarki
- b) Fakta bahwa negara mempunyai kemampuan militer yang ofensif
- c) Fakta bahwa ketidakpastian tindakan dari negara lain
- d) Kelangsungan hidup negara adalah tujuan utama
- e) Kekuatan besar berasal dari aktor rasional

Ketika kelima asumsi ini digabung maka akan mewujudkan untuk bertindak ofensif terhadap satu sama lain. Oleh karena itu, ada kepentingan konstan oleh negara untuk mendominasi atau dengan kata lain mengejar status sebagai 'negara hegemon', demi memaksimalkan keamanan maksimum. Dengan kata lain, realisme ofensif berfokus pada kekuatan besar karena dalam *struggle for power* (perebutan kekuasaan) kekuatan besar berada di posisi pertama (Biller, 2017, hal. 5).

Di sisi lain, Kenneth Waltz (1979) dalam tulisannya *Theory of International Politics* yang menjadi dasar asumsi neorealisme mengatakan bahwa negara justru sebaiknya tidak mengejar keamanan maksimal. Neorealisme defensif melihat bahwa negara hanya sebatas untuk mencari keselamatan. Maka dari itu, ekspansi atau pengejaran kekuatan hanya jika berada di kondisi tertentu (Taliaferro, 2000, hal. 135). Misalnya, jika Negara A mengejar kekuatan yang maksimal untuk mencapai hegemon, hal ini justru menekan sistem internasional yang membuat negara lain menjadi terancam dan menyerang Negara A.

Neorealisme menggambarkan kepentingan nasional negara pada sifatnya adalah untuk *survive* dalam struktur internasional. Thomas W. Robinson (Shembilku, 2004) mengklasifikasikan kepentingan nasional terdiri dari:

- a) Kepentingan Primer: yaitu kepentingan yang dimiliki oleh setiap bangsa. Kepentingan ini terdiri dari penjagaan suatu negara atas identitas mereka secara fisik, politik, dan budaya.
- b) Kepentingan sekunder: yaitu kepentingan dibawah kepentingan primer yang seperti kepentingan untuk memberikan perlindungan warga di luar negeri;
- c) Kepentingan Permanen: Kepentingan ini mengacu terhadap kepentingan jangka panjang. Sebagai contoh, yaitu kepentingan AS untuk mempertahankan pengaruhnya agar bisa bebas bernavigasi di tiap samudra;
- d) Kepentingan Variabel: adalah jenis kepentingan terhadap sektor tertentu yang dianggap penting oleh suatu negara. Kepentingan ini biasanya juga bergantung pada kondisi suatu negara. Sebagai contoh, yaitu kepentingan AS untuk memengaruhi Uni Soviet berhenti setelah Perang Dingin;
- e) Kepentingan Umum: merupakan kepentingan yang merujuk pada dampak positif suatu negara. Kepentingan ini juga berlaku untuk beberapa bidang seperti perdangan, ekonomi, hubungan bilateral dan multilateral, dan ekonomi; dan
- f) Kepentingan Khusus: merupakan turunan dari kepentingan umum. Kepentingan ini didefinisikan atas dasar waktu dan ruang. Contoh mudah dari kepentingan khusus adalah ketika Pakitstan memerangi terorisme merupakan manifestasi kepentingan AS untuk menangkal pengaruh komunis saat Perang Dingin (Dinesh, Tanpa Tahun.).

Melalui teori neorealisme, Cina bersama MIC25 akan melakukan ekspansi global hal ini dikarenakan Cina memiliki kepentingan untuk mencari kekuasaan di struktur internasional. Cina berusaha untuk mengumpulkan *power* agar menjadi

pemimpin global. Jika, MIC25 ini berhasil maka Cina sendiri menjadi salah satu negara adidaya terutama di bidang manufaktur dan industri. Selanjutnya, berdasarkan klasifikasi kepentingan nasional. Maka, MIC25 merupakan rencana strategis Cina untuk mencapai posisi permanen sebagai pemimpin global di bidang industri manufaktur dan teknologi.

D. Hipotesis Penelitian

Berangkat dari latar belakang dan kerangka pemikiran di atas, penulis berargumen bahwa di balik rencana strategis Made in China 2025, Cina memiliki kepentingan baik secara politik maupun ekonomi yaitu:

1. Menjadi pemimpin global
2. Mengurangi ketergantungan teknologi negara maju
3. Keluar dari *middle-income trap*
4. Mengatasi penurunan usia produktif

E. Metode Penelitian

Secara definisi metode penelitian adalah cara ilmiah dalam mendapatkan data dengan tujuan dan manfaat tertentu (Sugiyono, 2013, hal. 1). Untuk menjawab masalah penelitian “Mengapa Cina serius dalam menyukseskan rencana strategis Made in China 2025? penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk pengumpulan data. Metode kualitatif sendiri adalah turunan dari filsafat postpositivisme yang berasumsi realitas sosial adalah sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis, resiprokal (sebab-akibat), dan bermakna. Dengan kata lain, metode kualitatif merupakan suatu metode yang menggambarkan suatu fenomena melalui penerjemahan ke dalam kalimat dan bahasa dengan menggunakan metode ilmiah. Oleh karena itu, metode kualitatif pada akhirnya menekankan makna dibandingkan generalisasi (Sugiyono, 2013, hal. 9). Tulisan ini akan menggunakan teknik penelitian kepustakaan dengan memperoleh data sekunder dan valid yang berasal dari buku, jurnal, surat kabar, dan dokumen-dokumen akademik lainnya yang sesuai dengan disiplin Ilmu Hubungan

Internasional untuk menganalisis dan mendalami kepentingan Cina melalui program Made in China 2025.

F. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dasar terbentuknya rencana strategis MIC25 dan implementasi strategi pemerintah Cina untuk merealisasikan MIC25
2. Menganalisis kepentingan ekonomi dan politik dibalik rencana strategis MIC25

G. Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi fokus pembahasan ini agar tetap sejalan dengan judul yang telah diajukan, maka dari itu penelitian ini akan membahas dan menganalisis ambisi Cina dalam menyukseskan rencana strategis Made in China 2025 pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Tahun 2015 sendiri merupakan tahun diresmikannya rencana strategis MIC25. Penulis memfokuskan batasan waktu pada tahun 2015 sampai 2021 untuk menganalisis terbentuknya rencana strategis MIC25 beserta implementasinya dan kepentingan Cina baik secara politik maupun ekonomi dalam MIC25.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan melihat pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dijabarkan sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan pada skripsi ini akan terbagi dalam empat bab. Dalam setiap bab dalam skripsi ini akan dijabar secara menyeluruh melalui sub-sub bab.

BAB I merupakan bab pendahuluan yang berisi delapan sub bagian, sub bab pertama yaitu latar belakang yang berisikan muasal terjadinya revolusi industri yang terjadi di Inggris. Dewasa ini dunia mulai beralih menuju revolusi industri 4.0, salah satunya Cina yang menggagas rencana strategis Made in

China 2025 pada tahun 2015 untuk mengurangi ketergantungan Cina terhadap teknologi asing dan memasarkan produk teknologi mereka di pasar global. Oleh karena itu, melalui latar belakang tersebut maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah mempertanyakan ambisi Cina untuk menyelesaikan rencana strategis tersebut. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, pada sub bab selanjutnya yaitu kerangka pemikiran yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah tersebut melalui konsep *neorealisme*. Melalui kerangka pemikiran tersebut maka hipotesa penelitian ini adalah “Cina memiliki kepentingan agar bisa mendominasi negara maju lainnya terkhusus Amerika Serikat demi meningkatkan *power* dalam kapabilitasnya di struktur internasional dengan menguasai pasar di bidang manufaktur dan teknologi”.

Selanjutnya, pada sub bab metode penelitian, penulis menjelaskan bahwa penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif untuk pengumpulan data dengan teknik penelitian kepustakaan. Pada sub bab berikutnya yang menjadi landasan dari penelitian ini dijelaskan pada sub bab tujuan penelitian. Kemudian, pada sub bab berikutnya yaitu jangkauan penelitian yang mana penulis membatasi fokus tulisan ini pada tahun 2015-2021.

BAB II merupakan bab pembahasan yang menjelaskan mengenai kebijakan industri Cina sebelum lahirnya MIC25 yaitu reformasi ekonomi tahun 1978, keputusan Cina bergabung dengan WTO, dan kebijakan industri dalam Kongres Nasional ke-18. Selanjutnya, pada bab ini juga akan membahas perbandingan kebijakan industri milik Jerman yaitu Industry 4.0 yang dijadikan landasan Cina untuk merumuskan MIC25 sebagai rencana strategi pemerintah Cina. Terakhir, dalam bab ini akan menjelaskan strategi pemerintah Cina dalam menyelesaikan rencana strategis MIC25 dan implementasinya ke dalam sepuluh industri terpilih dalam MIC25.

BAB III merupakan bab pembahasan lanjutan yang menjelaskan secara keseluruhan kepentingan politik yang ingin diraih Cina yaitu menjadi pemimpin global dan mengurangi ketergantungannya dengan teknologi asing dan MIC25 yang

kemudian dijadikan sebagai alat perang teknologi dengan Amerika Serikat. Selain itu, pada bab ini juga akan membahas kepentingan dari segi ekonomi yang terdiri dari usaha Cina dengan menggunakan MIC25 untuk keluar dari *middle-income trap* dan mengatasi usia produktif yang sedang terjadi di Cina.

BAB IV merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari seluruh penelitian.